



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA : KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUDI ALEK WAHYUDIN
2. Jabatan : SEKRETARIS BADAN
3. NHK : 794125

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.390.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 990.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 205.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 160.000.000
2. MOBIL, LIVINA X GEAR Tahun 2013, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.606.000.000

III. HUTANG Rp. 413.600.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.192.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.